

ABSTRAK

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN JOKI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG

(Studi Putusan Nomor : 510/Pid.Sus/2024/PN Tjk)

**Oleh
WILLY GUSTI PRADANA**

Joki pada tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) merupakan cara curang yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk meloloskan calon peserta. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memanipulasi dokumen elektronik pada seleksi tes CPNS dibuat seolah-olah data otentik pelamar untuk dapat mengikuti tes CPNS. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: Bagaimana Penegakan Hukum terhadap perbuatan joki CPNS Kejaksaan Tinggi Lampung (Studi Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN TJK) dan faktor penghambat penegakan hukum terhadap perbuatan joki CPNS Kejaksaan Tinggi Lampung (Studi Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN TJK).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan didukung yuridis empiris. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil Penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap perbuatan joki CPNS Kejaksaan Tinggi Lampung berdasarkan Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN TJK dilakukan pada tahap aplikasi, di mana pada tahap aplikasi ini melibatkan pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Tahap kepolisian yaitu penyelidikan dan penyidikan diperoleh bahwa terdakwa memanipulasi dokumen elektronik dengan cara membuat KTP palsu dan melakukan verifikasi wajahnya yang tidak sesuai dengan pelamar aslinya. Pada tahap penuntutan jaksa penuntut umum mendakwa dengan dakwaan alternatif Pasal 35 jo Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 263 Ayat (2) KUHP. Jaksa menuntut dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,-. Tahap putusan pengadilan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Pada aspek yuridis terdakwa dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun dan pidana denda

Willy Gusti Pradana

sebesar Rp5.000.000. terbukti secara sah dan meyakinkan memanipulasi dokumen elektronik seolah-olah data yang otentik sesuai dakwaan alternatif pertama Pasal 35 *jo* Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap joki CPNS antara lain Faktor undang-undang yaitu peraturan perundang-undangan saat ini belum memadai dalam menindak tindakan perbuatan joki CPNS. Faktor aparat penegak hukum yaitu kurangnya koordinasi antar instansi dalam menangani praktik joki CPNS. Faktor sarana prasarana yaitu kurangnya alat yang memadai untuk penyeleksian lebih ketat tentang otentik data pribadi setiap calon peserta tes CPNS. Faktor masyarakat yaitu masyarakat masih mempercayai praktik joki dapat memudahkan anaknya lolos tes CPNS. Faktor kebudayaan yaitu terhadap perkembangan budaya teknologi dan komunikasi yang memberikan kemudahan orang lain untuk memanipulasi data pada *website* pendaftaran CPNS.

Adapun saran dalam penelitian ini, kepada Aparat Penegak Hukum (APH) diharapkan dalam penegakan hukum terhadap joki CPNS dapat lebih maksimalkan di tahap aplikasi sehingga memberikan keadilan kepada peserta CPNS lainnya. Kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) diharapkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana dalam memverifikasi awal data pelamar di *website* pendaftaran peserta CPNS di setiap instansi manapun agar tidak terjadi perbuatan dokumen elektronik seolah-olah data yang otentik.

Kata Kunci : Penegakan, Joki CPNS, Kejaksaan.

ABSTRACT

ANALYSIS OF LAW ENFORCEMENT AGAINST THE USE OF JOKI IN CIVIL SERVANT CANDIDATE (CPNS) EXAMS AT THE LAMPUNG HIGH PROSECUTOR'S OFFICE

(A Study of Decision Number 510/Pid.Sus/2024/PN Tjk)

By

WILLY GUSTI PRADANA

Proxy practices ("joki") in the Civil Servant Candidate (CPNS) exam represent a form of cheating carried out by individuals or groups to help candidates pass the selection process. This fraudulent act is conducted by manipulating electronic documents during the CPNS test selection, making the data appear as if it is authentic applicant information. Based on this background, the research problem formulation focuses on how law enforcement is applied against the CPNS proxy practices at the Lampung High Prosecutor's Office (a study of Decision Number 510/Pid.Sus/2024/PN Tjk) and what factors hinder the enforcement of law against these proxy acts.

This study employs a normative juridical approach supported by empirical juridical analysis. The data used consist of primary and secondary data, with data collection methods involving literature studies, particularly of the Information and Electronic Transactions Law. The informants in this study include lecturers from the Criminal Law Department of the Faculty of Law at Lampung University.

The research reveals that law enforcement against CPNS proxy practices at the Lampung High Prosecutor's Office, based on the referenced court decision, is carried out in the application stage involving the police, prosecutors, and courts. During the police stage, investigations found that the defendants manipulated electronic documents by creating fake identity cards and performing facial verification that did not match the original applicants. At the prosecution stage, the public prosecutors charged the defendants with alternative charges under Article 35 in conjunction with Article 51 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions or Article 263 paragraph (2) of the Criminal Code. The prosecutors demanded a one-year prison sentence and a fine of IDR 10 million. The court ruling considered juridical, philosophical, and sociological aspects, sentencing the defendant to one year in prison and a fine of IDR 5 million, proving beyond reasonable doubt that the defendant manipulated electronic documents as alleged under the Information

Willy Gusti Pradana

and Electronic Transactions Law. Factors hindering law enforcement against CPNS proxy practices include inadequate legislation specifically addressing proxy acts, lack of coordination among law enforcement agencies, insufficient facilities and infrastructure for stringent verification of applicant data, societal beliefs that proxy services facilitate exam success, and the evolving digital culture that makes it easier to manipulate registration websites.

The study recommends that law enforcement agencies maximize application-stage enforcement to ensure justice for other CPNS candidates and that the National Civil Service Agency improve facilities and infrastructure for initial data verification on CPNS registration websites across all institutions to prevent falsification of electronic documents.

Keywords: Enforcement, CPNS Proxy Practices, Prosecutor's Office.